

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 KESIMPULAN

Hasil penelitian yang dapat diperoleh adalah Penulis menganggap bahwa Indonesia dan Jepang perlu mengkaji ulang segala kebijakan dan juga perjanjian-perjanjian yang dibuat bersama, karna seperti yang dapat kita lihat bersama Indonesia belumlah cukup siap untuk menghadapi Hambatan dagang yang sudah diatur oleh IJEPA. Ketidaksiapaan Indonesia bukan saja dari Hambatan Tarif yang cukup besar untuk setiap produk unggulan tetapi juga dari Hambatan Non-Tarif yang terbilang cukup ketat. Dimana Jepang memiliki Standar yang Tinggi untuk setiap Produk Perikanan sedangkan Indonesia dan Sumber Daya Manusia nya belum memadai untuk dapat menghasilkan Produk yang dapat sesuai dengan Standar Jepang. Meskipun Jepang pernah berinisiatif untuk membantu Indonesia mengadakan pelatihan dengan membawa 140 orang Indonesia untuk langsung belajar ke Jepang mengenai Pengembangan Produk, Peningkatan Mutu serta Keamanan Produk, hal ini tidak cukup menyelesaikan permasalahan yang ada di Indonesia.

Sementara itu TBM yang di rencanakan untuk menguntungkan kedua belah pihak nyata tidak bisa menguntungkan Indonesia secara signifikan. Jepang diatur dalam IJEPA untuk menyetujui penurunan TBM pertahunnya secara bertahap hingga TBM dapat menyentuh angka 0 % untuk setiap Produk Perikanan Indonesia. Namun nyata nya di hampir 10 tahun perjalanan Kerjasama Ekonomi antara Indonesia dan Jepang , Indonesia masih harus dibebani dengan Tarif 3,5% untuk Produk produk tertentu dan TBM normal pada Produk unggulan

seperti Tuna dan Cakalang hal ini harusnya dapat menjadi alasan Indonesia untuk mengkaji ulang Kerjasama Ekonomi Indonesia dan Jepang. Oleh karna dua hal diataslah penulis dapat menyimpulkan bahwasannya Penurunan yang terjadi pada Tahun 2014-2017 dikarna berat nya Hambatan Dagang dalam IJEPA yg diterima oleh Indonesia baik Hambatan Non-Tarif dan Hambatan Tarif dan buruknya Fasilitasi serta Manajemen Sumber Daya Perikanan Indonesia yg berpengaruh pada Kualitas Ikan.

6.2 SARAN

Sektor Perikanan Indonesia dalam era perdagangan mempunyai peluang yang cukup besar. Indonesia merupakan negara bahari yang sangat kaya dengan potensi perikanan dan kelautannya, Laut yang luas menyimpan banyak jenis ikan dan hasil perairan laut lainnya yang memiliki nilai ekonomis yang sangat penting dan sebagai salah satu penyumbang terbanyak terhadap devisa negara. (Ahmad Fauzi, 2010:28)

Seharusnya hal ini dapat dilihat Indonesia sebagai Peluang yang cukup bagus untuk meningkatkan pendapatan negara diiringi dengan banyaknya kerjasama Indonesia dengan negara negara lain. Namun yang dapat dilihat dari permasalahan pada skripsi ini adalah Indonesia belum bisa memaksimalkan peluang dan kesempatan yang ada untuk dapat mewartakan perkembangan di Sektor Perikanan.

Melihat dari banyaknya kendala yang Indonesia dapatkan ketika berkerjasama dengan Jepang dalam hal ini IJEPA , seharusnya pemerintah siap memfasilitasi dan memberikan akses kepada Indonesia untuk dapat bertahan pada pasar global misalnya dengan meningkatkan Saran dan Prasarana jalan ,

Infrastruktur Pelabuhan dan Pusat Pendaratan Ikan, Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia sehingga dapat kompeten dan berstandar Internasional, meningkatkan sumber daya listrik dan bahan bakar minyak , Memperbaiki sistem dan fasilitas Transportasi Darat, Udara serta Laut guna menunjang kegiatan di Sektor Perikanan sehingga biaya Transportasi lebih rendah , memperketat keamanan laut untuk mencegah Penangkapan Ikan Ilegal dan pejualan ikan antar kapal sehingga Sumber Daya Laut tetap dapat memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri.

Dan Untuk mengatasi Hambatan Tarif , semestinya Indonesia dapat lebih teliti dan berhati-hati dalam menyetujui suatu kebijakan. Melihat IJEPA merupakan sebuah 2 pikiran dari 2 negara semestinya baik Indonesia maupun Jepang dapat lebih cepat mengetahui kemampuan setiap negara dalam hal ini Indonesia dan Jepang, karna belum tentu yg mampu disetujui Jepang mampu pula untuk dilakukan Indonesia , melihat kesenjangan perekonomian dan juga nilai mata uang yang cukup signifikan. Oleh karna itu melihat adanya permasalahan pada tahun 2014-2017 penulis berharap Indonesia dapat mengkaji ulang kebijakan TBM bersama dengan Jepang guna mendapatkan suatu Tarif yang dapat menguntungkan kedua belah pihak